

**PENEMUAN PRIME MOVER INTEGRASI POTENSI PEMANGKU
KEPENTINGAN PADA IMPLEMENTASI KONSERVASI
SUMBER DAYA AIR
(Studi Kasus: Keterpaduan Antarsektor di DAS Kawunganten)**

Suhardi Alimudarto*

ABSTRACT

Global climate changes cause many environmental problems such as flood or even long dry season which bring suffer to the farmers. Because of that, various technique matters related to the Water Resources become one of the parts that face many challenges. Based on the research, there are 3 major motivators of integration potentials supporting the interests in the conservation of water resources: the role in developing community groups, the role of conservation community group of Water Resources, and the community based role.

1. Latar Belakang

Konservasi Sumber Daya Air (SDA) harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi yang mencakup semua bidang konservasi yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Perubahan iklim global menyebabkan berbagai persoalan lingkungan seperti perubahan pola curah hujan yang mengakibatkan banjir ataupun musim kemarau berkepanjangan serta berubahnya musim tanam yang merugikan petani. Para petani sulit menentukan pembibitan, perkiraan panen, serta serangan hama tak terduga. Tantangan teknis SDA menghadapi persoalan yang serius, tidak saja bidang prasarana fisik yang merupakan peringkat keras, tetapi juga sistem

konservasi dan pengembangan SDA yang merupakan perangkat lunak Konservasi Wilayah Sungai. Hal itu sebagai bagian dari sistem konservasi SDA juga menghadapi tantangan serius dengan semakin meluasnya lahan kritis dan semakin kritisnya SDA karena berpengaruh terhadap kapasitas lahan pertanian secara kuantitas dan kualitas serta berdampak langsung kepada produktivitas dan kehidupan para petani. Diakui bahwa kondisi tersebut terjadi lebih karena ulah manusia dibanding karena alam. Manusia adalah komunitas yang bermukim di Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Sub DAS dengan pola penghidupan dan kehidupan sosial ekonomi dan budaya dengan aktivitas kesehariannya dalam hidupnya selama bertahun-tahun, yang berdampak negatif terhadap kondisi lingkungannya.

Pada tanggal 28 April 2005 Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dicanangkan oleh Presiden RI yang tujuan akhirnya

* Peneliti Puslitbang Sosial Ekonomi Budaya dan Peran Masyarakat – Badan Litbang Dep PU

adalah pengembalian keseimbangan siklus hidrologis pada kawasan DAS melalui keterpaduan dan peran semua sektor dan NGO. Namun, gerakan ini belum dilaksanakan secara merata di seluruh daerah hingga keterpaduan juga belum terwujud seperti yang diharapkan. Demikian halnya dalam pelibatan masyarakat secara partisipatif pada upaya-upaya konservasi dalam aksi tindak nyata GNKPA belum dilakukan oleh semua sektor secara terpadu. Oleh karena itu, membangun kemitraan melalui aksi tindak nyata GNKPA dalam konservasi SDA menghadapi permasalahan dan tantangan. Di lapangan dijumpai belum adanya acuan keterpaduan bersama untuk teknis operasionalisasi GNKPA guna pelaksanaan sinkronisasi kegiatan antar-sektor pada tingkat lokasi. Lokasi tersebut kondisinya spesifik baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya.

2. Ruang Lingkup

- a. Bagaimana proses membangun integrasi potensi para pemangku kepentingan pada implementasi tingkat desa lokasi pada DAS kritis.
- b. Bagaimana acuan keterpaduan dan kemitraan bagi para sektor dan instansi terkait pada dimensi operasional di pusat dan daerah.
- c. Bagaimana dengan acuan tsb aksi tindak nyata bidang konservasi SDA dalam pekerjaan sipil teknis dan vegetasi pada suatu DAS/SUBDAS kritis dapat diwujudkan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penelitian ini yaitu menunjang upaya mewujudkan kondisi yang kondusif dalam konservasi SDA melalui potensi pemangku kepentingan bidang penyelamatan air dalam aksi tindak nyata di desa. Tujuannya memberikan rekomendasi bentuk penyelesaian permasalahan kurangnya keterpaduan penanganan konservasi SDA.

4. Definisi Operasional

GNKPA adalah kepanjangan dari Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 28 April 2005, sebagai pernyataan politik kebijakan negara ke depan, untuk mewujudkan keterpaduan tindak dari berbagai sektor, wilayah, para pemilik kepentingan (pemangku kepentingan unsur pemerintah, swasta, dan NGO) dalam konservasi sumberdaya air melalui konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, pengendalian daya rusak air yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Sumber :Sekretariat Tim GNKPA Antar Departemen, Panduan, 2006)

METODOLOGI DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena akan dibangun konsep penanganan masalah berdasarkan temuan data lapangan. Dengan menggali permasalahan dari bawah dan berusaha mencari keterkaitan

antarmasalah yang satu dengan yang lainnya untuk memandu jalannya studi dan membangun konsep-konsep baru. Oleh karena itu, perlu dibangun kerangka konseptual.

Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (1994 : 31), kerangka konseptual perlu memaparkan dimensi-dimensi kajian yang utama, faktor kunci atau variabel-variabel dan hubungan antara dimensi-dimensi tersebut. Oleh karena itu, kerangka konseptual kajian ini perlu dilihat dengan mencakup persepsi, motivasi, potensi integrasi pemilik kepentingan dan kesiapan sosial kelompok komunitas dan pemangku kepentingan daerah yang dihubungkan dengan pelaksanaan konservasi SDA dalam rangka GNKPA.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung kuantitatif. Pendekatan kualitatif dalam konteks penelitian ini diperlukan untuk menggali potensi, persepsi pemangku kepentingan dalam konservasi SDA, agar dapat dirumuskan alternatif solusinya. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai pendukung kajian ini untuk mengukur tingkat kesiapan pemangku kepentingan di tingkat kelompok komunitas dalam konservasi SDA melalui aksi tindak nyata GNKPA.

2. Pelaksanaan Penelitian

2.1. Pengumpulan data

Langkah-langkah dalam pengumpulan data dilakukan seperti pendapat Creswell (1994:148) yaitu diawali dengan memberikan lingkup batasan studi sebagai langkah pertama, kemudian pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, studi

literatur, FGD, dan diskusi kelompok masyarakat, dan penyebaran kuesioner.

Lingkup kajian atau batasan studi ini diawali identifikasi kinerja para pemangku kepentingan dalam upaya penyelamatan air, baik unsur pemerintah Kabupaten Cilacap maupun lembaga-lembaga komunitas di Desa Mentasan. Wawancara dilakukan terhadap para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah Kabupaten Cilacap dan di lokasi penelitian Desa Mentasan serta tokoh-tokoh masyarakat. Untuk kelompok-kelompok komunitas Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dan diskusi kelompok masyarakat. Materi pokok FGD dan wawancara adalah permasalahan yang timbul dalam bidang konservasi SDA dan pengelolaan dalam rangka GNKPA, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dalam mendukung keterpaduan penyelamatan air tersebut. Juga mengenai motivasi, persepsi, dan potensi kelembagaan komunitas lokal terutama tingkat kesiapannya untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam keterpaduan pelaksanaan GNKPA.

Analisis data dilakukan melalui identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi (Miles & Huberman, 1994). Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran kelompok komunitas dalam mewujudkan integrasi para pelaku kepentingan untuk keterpaduan pelaksanaan GNKPA.

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dilakukan pada lokasi pelaksanaan GNKPA Kabupaten Cilacap DAS Citanduy, Sub DAS Kawunganten, Desa Mentasan.

2.2. Mengidentifikasi Kinerja Pemangku Kepentingan

Unsur pemerintah

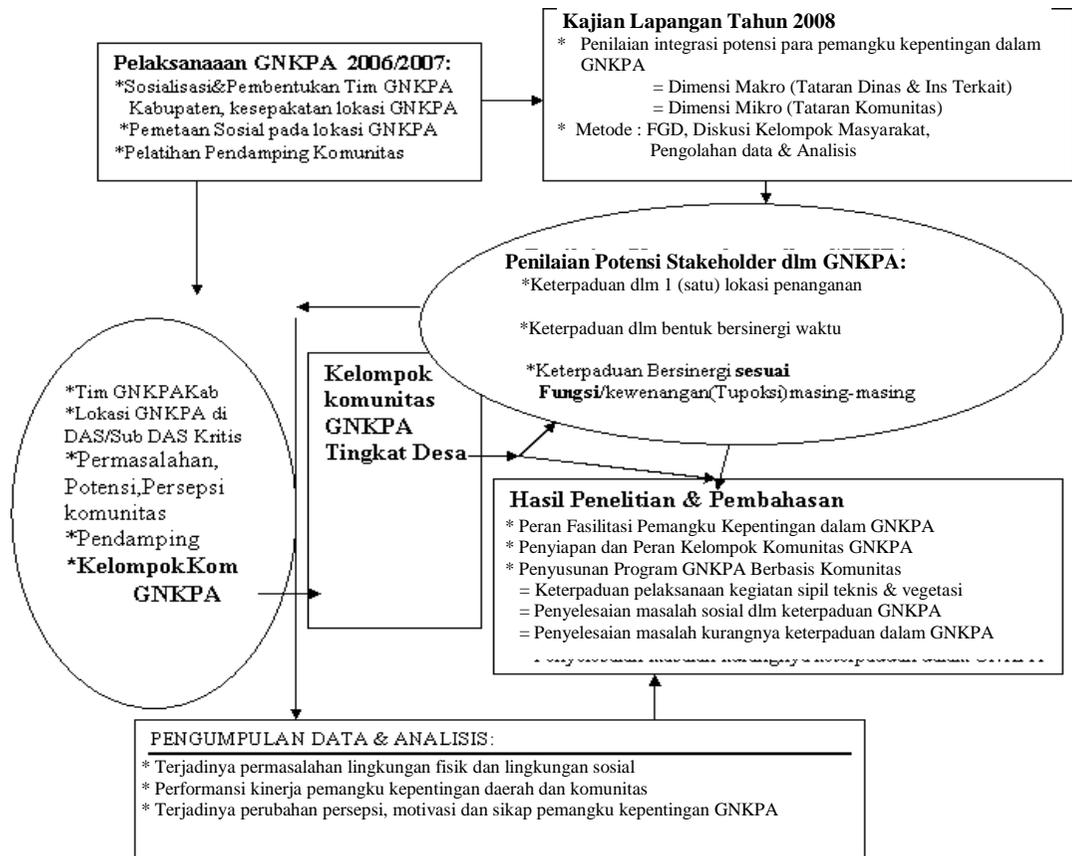
- a. Pemerintah Kabupaten Cilacap
 - Bappeda,
 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - Dinas Pertanian dan Peternakan,
 - Dinas PU,
 - BPKSA,
 - BPMD,
 - Perhutani / KKPH (Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan) Banyumas Barat
- b. Pemerintah Kecamatan Kawunganten
- c. Perhutani (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH))
- d. Pemerintah Desa Mentasan

2.3. Mengidentifikasi Kinerja Pemangku Kepentingan Unsur Kelompok Komunitas GNKPA Desa Mentasan.

Kelompok-kelompok Komunitas bidang konservasi/pemanfaat SDA dalam wadah kelompok komunitas GNKPA tingkat desa Mentasan meliputi: Kelompok Wanabakti 1 (tani hutan), Kelompok Wanabakti 2 (tani hutan), Kelompok Ngudhi Rahayu (ternak), Kelompok Sri Rejeki 1 (tani), Kelompok Sri Rejeki 2 (tani), Kelompok Simpan Pinjam, Kelompok Tani khusus tanaman obat2an, LMDH, BPD, LPPMD, PKK, Kelompok Muslimat, Kelompok Tahlilan, dan Karang Taruna.

2.4. Pengamatan lokasi keterpaduan Pemangku Kepentingan dalam Konservasi SDA di desa Mentasan

Di samping menggunakan metode FGD dan diskusi kelompok masyarakat, juga dilakukan pengamatan lapangan di lokasi kegiatan GNKPA DAS/Sub DAS Kawunganten, Anak Sungai Kali Brokeh, desa Mentasan kecamatan Kawunganten, kabupaten Cilacap. Lokasi ini merupakan tempat terdapatnya komponen pekerjaan sipil teknis dan vegetasi para pemangku kepentingan dalam rangka GNKPA. Untuk konservasi daerah hulu dengan tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan (jati, mangga, rambutan, dan karet) oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Cilacap. Untuk kawasan di tengah merupakan lokasi pembangunan embung oleh BBWS Citanduy. Kemudian untuk kawasan pertanian dengan tanaman hortikultura dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap dalam pemanfaatan potensi embung.



Gambar 1

KERANGKA KONSEPTUAL MENEMUKAN PRIME MOVER INTEGRASI PEMANGKU KEPENTINGAN PADA IMPLEMENTASI KONSERVASI SDA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Proses Menyiapkan Kelompok Komunitas

Tahapan penyiapan kelompok komunitas GNKPA tingkat desa yang dilakukan telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitasi GN-KPA Tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelompok komunitas GN-KPA tingkat desa sesuai Lampiran Surat Edaran SekDitjen SDA No.

UM.01.03-As/92 tanggal 5 Maret 2008). Tahapan tersebut meliputi Sosialisasi dan Fasilitasi GNKPA tingkat kabupaten, Pemetaan Sosial, serta Pelatihan Pendamping komunitas.

1.1 Sosialisasi untuk Integrasi Pemangku Kepentingan dalam GN-KPATingkat Kab/Kota

Pada tahap ini telah dilakukan sosialisasi, pembahasan dan menyepakati bersama atas hal-hal yang terkait dengan koordinasi sektor terkait

di tingkat Kabupaten yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan sosialisasi kepada pemangku kepentingan:

1. Penetapan lokasi SubDAS
2. Pembentukan Tim GN-KPA Kab
3. Pembekalan kepada Tim GN-KPA kabupaten oleh Tim GNKPA antar Departemen
4. Observasi /Peninjauan lapangan ke lokasi terpilih

b. Penyusunan matriks dan sinkronisasi program 2008 – 2011 (persandingan program Pusat, Provinsi, Kab, dan NGO).

c. Rencana tindak lanjut

- Kesepakatan jadwal rapat kerja Tim GN-KPA
- Kesepakatan waktu sinkronisasi pelaksanaan lapangan

1.2 Pemetaan Sosial (*Social mapping*)

Pemetaan Sosial untuk desa Mentasan juga telah dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 April 2007. Dari penelitian dan kajian lapangan dengan metode pemetaan sosial diperoleh gambaran kondisi dan permasalahan lingkungan fisik dan sosial termasuk persepsi warga dan potensi komunitas meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Kondisi Kritis Sumber Daya Air

Sumber daya air di DAS Citanduy, khususnya di Sub-DAS Kawunganten perlu diselamatkan karena kondisinya berpotensi kritis. Hal ini disebabkan antara lain penebangan

hutan, kerusakan akibat penambangan batu secara tradisional, serta adanya erosi dan sedimentasi

b. Rendahnya Produktivitas Pertanian

Produktivitas pertanian mengalami penurunan karena sawah milik warga kekurangan air/ hanya mengandalkan air hujan (sawah tadah hujan). Selain itu, hal ini juga diperburuk dengan : tidak adanya waduk ataupun saluran irigasi. Bak penampungan air yang ada kapasitasnya masih sangat kecil. Petani hanya mengandalkan sawah/padi. Usaha non-pertanian, seperti : buah-buahan, sayur-sayuran, peternakan, dan perikanan belum digarap secara optimal

c. Kondisi Mata Air

Sumur-sumur yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk rumah tangga. Ada satu sumur yang digunakan masyarakat pada musim kemarau yang jaraknya lebih dari 1 km dan harus mengantri sampai berjam-jam lamanya. Tiap rumah penduduk memiliki sumur sendiri sekitar 200 KK yg air sumurnya asin (dusun Tanjung Sari). Usaha yang dilakukan masyarakat belum optimal, tidak ada kelompok-kelompok yang peduli akan masalah tersebut. Dari desa ada upaya-upaya yang dilakukan dengan menampung air hujan

d. Kurangnya Peran Pemangku Kepentingan terhadap Kelompok Penyelamatan dan Pengelolaan Air

Desa Mentasan belum mempunyai kelompok komunitas yang

diberikan misi dan tugas pokok melakukan aktifitas penyelamatan air baik kualitas dan kuantitasnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan air untuk minum, rumah tangga, pengairan dan tanaman.

Selain itu, organisasi kelompok bidang-bidang pengairan yang ada belum berperan maksimal dalam upaya penyelamatan air, seperti bantuan air bersih dari PDAM dengan kapasitas yang sangat terbatas belum sampai ke desa Mentasan. Di samping belum disiapkannya masyarakat agar berpotensi untuk program ini, upaya-upaya lebih lanjut dari PDAM belum dilakukan. KUT (Sektor pertanian) masih terfokus pada pengadaan pupuk.

Bantuan PPK dengan membuat penampungan (bak-bak) di umbul yang ada di Desa Mentasan belum membentuk organisasi kelompok komunitas untuk konservasi dan pengembangannya. (hanya berjalan selama 6 bulan). Kelompok tani hutan dalam GNRHL yang menghasilkan (hampir 80% lahan yang dulunya gundul sekarang sudah dihutankan kembali dengan tanaman jati, albasia, dan akasia) belum melakukan upaya untuk tumbuhnya tanaman buah dan sayuran. Dengan demikian, sebagian warga pindah mengerjakan lahan.

e. Belum Optimalnya Peran Kelembagaan Pemangku Kepentingan

Pada hakikatnya kelembagaan pemangku kepentingan, dinas-dinas, dan sektor terkait/Tim GNKPA di tingkat Kab. Cilacap cukup responsif terhadap mensinkronkan program mereka dalam upaya penyelamatan air, tetapi dalam

posisi pasif. Kelembagaan juga kurang dukungan perangkat pengaturan, mengingat konservasi dalam upaya penyelamatan air selalu terkait dengan sumber/mata air yang kebanyakan terdapat di hutan, maka persinggungan dengan Perhutani sering tak terelakkan lagi. Dalam konteks penguatan kelembagaan, keberadaan Perhutani belum dipertimbangkan untuk penyempurnaan kelembagaan GN-KPA, baik yang ada di pusat, provinsi, maupun kabupaten

f. Kurangnya Koordinasi dalam Penyediaan Lahan/Perijinan

Masih ada kesulitan koordinasi dalam masalah perizinan lahan, pembangunan embung oleh BBWS terpaksa dihentikan karena tidak mendapat izin dari Perhutani selaku pemilik lahan tersebut. Semakin lamanya proses konstruksi di lapangan, berakibat semakin lama pula warga dapat menikmati fungsinya untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pertanian, dll.

Akibatnya pembangunan masih terbatas pada lahan milik masyarakat dan belum dapat masuk ke lahan Perhutani, sedangkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan masih sedikit, meliputi :

- *Land clearing* & pembuatan jalan masuk/akses menuju lokasi
- Penggalan pondasi untuk bangunan pengelak (*cofferdam*)

g. Kondisi Lokasi/Kapasitas Air dan Kekawatiran Masyarakat

Pembangunan Embung di Desa Mentasan ini dilatarbelakangi oleh timbulnya permasalahan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air baku untuk penyediaan air bersih, air rumah tangga dan air irigasi di daerah Kawunganten dan Bantarsari, khususnya pada musim kemarau. Permasalahan yang dihadapi di desa Mentasan adalah adanya kekhawatiran masyarakat yang pada awalnya cenderung menolak, karena jika dibangun Embung, pembagian air tidak bisa merata ke seluruh desa mengingat elevasi muka air yang kurang tinggi, kecuali jika Embung dinaikkan elevasinya. Memang pada lokasi ini dengan ketinggian rencana Embung yang dibangun, masih ada beberapa perumahan warga yang terdapat di hulu Embung yang posisinya lebih tinggi.. Karena perbedaan elevasi antara perumahan warga di hulu Embung dengan lokasi rencana Embung ini, maka kapasitas distribusi pasokan air yang dapat dialokasikan menjadi terbatas sehingga mengurangi jangkauan pelayanan bagi warga masyarakat yang membutuhkan.

k. Potensi Pemangku Kepentingan

1). Pengakuan Keberadaan Peran dalam Ketersediaan Sumber Air

Sumber air di desa Mentasan, dusun Tanjung Sari, sumber airnya banyak namun pada saat musim belangsung lebih dari 3 bulan sudah mengalami krisis lagi. Lahan pertanian (sawah) benar-benar hanya memanfaatkan musim hujan.

Harapannya agar pemerintah dapat memenuhi air masyarakat baik untuk pertanian maupun untuk rumah tangga.

2). Kelembagaan Komunitas

Desa Mentasan memiliki 14 kelompok komunitas) yang cukup berperan aktif dalam upaya penyelamatan air, di antaranya Kelompok Tani, Kelompok Tani Hutan, LMDH, dan kelompok tani Ngudi Rahayu. Kelompok ini juga memiliki peran yang cukup besar dalam kegiatan pembangunan di desa Mentasan khususnya dalam bidang upaya-upaya penyelamatan air.

3). Penyedia Fasilitas Pelatihan Pendamping Komunitas

Tahap selanjutnya dilakukan pelaksanaan pelatihan pendamping komunitas GNKPA. Pokok-pokok penting yang dilakukan dalam pelatihan meliputi penyiapan materi pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan. Materi pelatihan yang diberikan mencakup: Pengetahuan dan ketrampilan teknis pendampingan agar para peserta dapat melakukan pendampingan dengan baik. Di samping itu, diberikan pengetahuan dan kesadaran diri agar para peserta dapat mempunyai karakter dan berkomitmen menjadi seorang pendamping yang baik, sedangkan hasil-hasil pelatihan mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi

Dihasilkannya program ini awalnya disusun masih dalam bentuk

identifikasi permasalahan dan alternatif solusinya yang dibuat oleh para peserta pelatihan melalui proses survei kampung sendiri (SKS) bersama warga masyarakat. Peserta pelatihan adalah unsur dari kelompok-kelompok komunitas bidang konservasi SDA yang sudah ada yang merupakan kader-kader pembangunan hasil binaan dari masing-masing sektor anggota GNKPA. Selanjutnya para peserta pelatihan yang pada hakikatnya merupakan cikal-bakal Kelompok komunitas GNKPA tingkat desa Mentasan mepresentasikan hasil identifikasi awal program tersebut kepada dinas dan intansi terkait yang merupakan Tim GNKPA kabupaten Cilacap.

b. Program Terpadu GNKPA Berbasis Komunitas

Setelah dikritisi, dikoreksi, dan dibahas serta diperbaiki, hasilnya disepakati dan disetujui pemangku kepentingan dinas-dinas terkait kabupaten Cilacap sebagai program GNKPA berbasis komunitas. Selanjutnya peserta/ kelompok komunitas GNKPA menyampaikan program ini untuk menjadi acuan integrasi dan keterpaduan semua sektor /dinas dan intansi di lingkungan pemerintah kabupaten Cilacap. Penyampaian dilakukan secara berjenjang kepada Tim GNKPA kab/kota dan provinsi serta Tim GNKPA antardepartemen di Pusat yang merupakan wadah semua sektor anggota GNKPA

c. Peneguhan Komitmen Pendamping Komunitas

Pada akhir pelatihan, di samping menghasilkan program terpadu GNKPA berbasis komunitas, juga dilakukan peneguhan komitmen pendamping komunitas. Para peserta menyatakan kesanggupan dan kebulatan tekadnya dengan berkomitmen untuk menjadi agen pembaharu yang berkarakter dan sekaligus pendamping komunitas GNKPA yang baik.

d. Pembentukan Kelompok Komunitas GNKPA

Pada kesempatan peneguhan komitmen, para peserta atau calon pendamping juga melakukan pembentukan kelompok komunitas GNKPA tingkat desa, dengan menunjuk para pengurusnya, atau minimal tim formatur kelompok komunitas GNKPA tingkat desa.

2. Peran Kelompok Komunitas Konservasi SDA

2.1. Kesiapan Kelompok

Pada tahap ini dilakukan penilaian atas kondisi kesiapan kelompok komunitas pascasosialisasi, pemetaan dan pelatihan yang diakhiri dengan penyusunan program terpadu GNKPA berbasis komunitas, dan pembentukan kelompok komunitas GNKPA. Kesiapan masyarakat atau kelompok komunitas GNKPA dinilai kesiapannya baik dalam upaya-upaya penyelamatan air pada umunya maupun kegiatan sipil teknis dan vegetasi yang sedang berjalan. Pada saat penilaian

dilakukan kegiatan yang sedang berjalan adalah pelaksanaan pembangunan Embung. Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) indikator kesiapan masyarakat / kelompok komunitas, yaitu persepsi, potensi, dan hubungan kelompok komunitas dengan pemangku kepentingan. Penilaian dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 30 orang responden merupakan unsur-unsur yang mewakili masing-masing kelompok komunitas bidang konservasi/pemanfaat SDA yang kesemuanya tergabung dalam kelompok komunitas GNKPA tingkat desa. Untuk akurasi penilaian didukung analisis kuantitatif melalui penggunaan metode SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Analisis Frekuensi atas hasil pengolahan data melalui SPSS tersebut, telah dilakukan untuk masing-masing indikator sebagai berikut :

- 1) Persepsi kelompok komunitas, meliputi 8 indeks persepsi
- 2) Potensi, meliputi 3 indeks potensi, dan Indikator hubungan kelompok komunitas dengan pemangku kepentingan meliputi 4 hubungan
 - a. Kesiapan kelompok komunitas dinilai dari indikator persepsi terhadap rencana pembangunan Embung
 - Terdapat 8 indeks persepsi untuk menilai persepsi kelompok komunitas GNKPA terhadap rencana pembangunan Embung. Deskripsi dan analisis untuk masing-masing sub indikator adalah sebagai berikut
 - 1) Persepsi masyarakat untuk rencana pembangunan Embung, hampir seluruh responden menyetujui (100%), sementara jumlah Pokmas yang aktif dalam kegiatan penyelamatan air dan rencana pembangunan Embung dinyatakan > 10 kelompok komunitas (60%).
 - 2) Jumlah responden yang menyatakan dukungan terhadap pembangunan Embung meliputi > 10 Pokmas sebesar 56,7%.
 - 3) Sementara hanya < 4 pokmas yang menolak pembangunan Embung, didalam forum diskusi kelompok masy (*community group interview*).
 - 4) Dikaitkan dengan statement responden yang bersangkutan terhadap rencana pemanfaatan Embung, terdapat catatan mereka atas persetujuannya terhadap pemanfaatan Embung tersebut, yaitu apabila air telah mengalir diterima/sampai ke masing-masing warga masyarakat.
 - 5) bermanfaat/tidak bermanfaat Embung tersebut dibangun, seluruh responden menyatakan bermanfaat.
 - 6) jangkauan pelayanan pemanfaatan Embung, sebagian besar warga (96,7%) memahami bahwa Embung mempunyai manfaat yg lebih luas tidak hanya untuk rumah tangga, tetapi juga untuk pertanian, perkebunan dan usaha kehidupan lainnya.
 - 7) kepastian bahwa dirinya akan langsung menerima manfaat Embung, sebagian besar menyatakan bahwa dirinya akan langsung mendapatkan manfaat dari pembangunan (93,3%).
 - 8) sebagian besar responden bahwa pembangunan Embung akan dapat mengurangi konflik yg ada

dikaitkan dengan pandangannya bahwa selama ini para pemangku kepentingan berhasil dalam upaya mengurangi konflik (76,6%).

b. Indikator potensi masyarakat

- Terdapat indeks potensi yang dipertimbangkan dan telah dinilai signifikansinya terhadap potensi masyarakat dalam rencana pembangunan Embung, meliputi :

- 1) seluruh responden menyatakan bahwa kelompok komunitas yang ada siap untuk menyumbangkan potensinya dalam pembangunan Embung dengan 66,7% bersedia untuk melakukan gotong-royong. Di samping itu, sebanyak 20% responden menyatakan bahwa kelompok komunitas yang ada tidak hanya siap bergotong-royong tetapi juga bersedia menyumbangkan kemampuannya, baik dalam bentuk bahan maupun tenaga.
- 2) sisanya (13,33%) tidak hanya dalam bentuk gotong-royong, bahan & tenaga, namun juga dana.
- 3) warga secara individual, seluruhnya menyatakan kesediaannya siap untuk berpartisipasi (100%).
- 4) bentuk partisipasi, seluruh responden bersedia dengan partisipasi akan diberikan dalam bentuk sumbangan pemikiran/urun rembug (40%) sedangkan sisanya tidak saja dalam bentuk pemikiran dan tenaga, tapi juga aktivitas dengan menyumbangkan dana (60%).

c. Hubungan masyarakat dengan pemangku kepentingan.

- Terhadap kebijakan dan program yang telah direncanakan oleh para pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan warga masyarakat yang diharapkan dapat teratasi dengan mendapat manfaat dari pembangunan Embung.

- 1) sebagian besar 86,7 % menyatakan menerima manfaat langsung pembangunan Embung.
- 2) hanya sebagian kecil 13,3 % yang menyatakan tidak merasakan manfaat langsung, namun juga tidak terkena dampak negatif langsung.
- 3) aktivitas kelompok komunitas dalam memfasilitasi hubungan warga masyarakat dengan pihak proyek pembangunan Embung, hampir seluruh responden cukup aktif 96,7%. Dan hanya 3,3% yang pasif.
- 4) masalah yg mungkin terjadi dengan pihak proyek, lebuah dari ½ menyatakan tidak ada masaaah (53,33%) sedangkan sisanya menyatakan ada masalah (46,7%)

- Pengamatan lebih lanjut terhadap jumlah ini melalui analisis kualitatif diketahui bahwa masalah yang dimaksud adalah kesulitan bagi warga berhubungan dengan pihak Perhutani mengenai masalah belum dikeluarkannya izin lokasi pembangunan Embung. Upaya yang telah dilakukan oleh wakil dari Pokmas, yaitu LMDH, belum mendapat keputusan yang diharapkan

namun pada saat laporan penelitian ini dibuat, sudah ada konfirmasi dari Dinas Kehutanan kabupaten Cilacap lokasi telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dan segera akan dikeluarkan oleh BPLAN (Badan Planologi Kehutanan) dengan penggantian 1:1 oleh pemerintah kabupaten Cilacap.

- Pengamatan tentang konflik kemungkinan yang dilakukan dalam upaya penyelamatan, sebagian besar responden menyatakan belum pernah ada konflik dalam pembangunan proyek-proyek pengairan, yaitu 86,7%, sedangkan hanya sebagian kecil yang menyatakan pernah ada konflik dalam pembangunan proyek-proyek pengairan yaitu 13,13%. Pengamatan lebih lanjut atas data ini diperoleh informasi bahwa konflik yang dimaksud di desa tetangga (Kawunganten Lor). Untuk pembangunan embung Kali Gombang, masalah terjadi karena belum ada pengaturan dan kelembagaan pemanfaatan air yang ditunjuk sehingga pembagian air belum merata diterima oleh masyarakat .
- Di samping analisis rinci atas indeks potensi, persepsi dan hubungan komunitas dengan pemangku kepentingan tersebut di atas, untuk semua indikator juga dilakukan analisis dengan hasil sebagaimana pada tabel 1, 2, dan 3. Selanjutnya indeks masing-masing indikator digabung skornya (*compute*) menjadi 1 variabel besar : kesiapan masyarakat dalam pembangunan. Melalui proses dengan rumus statistik, untuk variabel kesiapan

masyarakat dibuat menjadi kategori : sangat siap 10%, cukup siap 63,3%, kurang siap 26,7%. Untuk kesiapan masyarakat dalam menghadapi rencana pembangunan Embung lebih dari separuh responden menyatakan cukup siap (63,3%), sedangkan sisanya 26,7% menyatakan kurang siap dan 10% menyatakan sangat siap.

- d. Kesiapan kelompok komunitas (Validasi dan korelasi) untuk Potensi masyarakat dalam GNKPA.

Pada setiap indikator, termasuk indikator potensi kelompok komunitas, juga dapat dilihat validasi dan korelasinya antara masing-masing indeks potensi tersebut.

2.2.Peran Kelompok Komunitas GNKPA dalam Penyelesaian Masalah Sosial dan Kurangnya Keterpaduan

Kelompok Komunitas tingkat desa Mentasan juga berperan secara signifikan pada saat perlunya penyelesaian masalah dalam rangka GNKPA, baik permasalahan sosial yang muncul maupun permasalahan karena kurangnya keterpaduan para dinas atau instansi anggota GNKPA.

3.Peran Program GNKPA Berbasis Komunitas mewujudkan RENSTRA dan Keterpaduan Nasional &Provinsi

Kelompok Komunitas GNKPA Tingkat Desa Mentasan dengan melalui tahapan pemetaan sosial,

pelatihan, SKS dan kegiatan kelompok di kelas, telah menghasilkan Program Terpadu GNKPA berbasis komunitas. Program ini telah menjadi acuan keterpaduan antar sektor/dinas dan intansi terkait di lingkungan kabupaten Cilacap

4. Hasil Keterpaduan GNKPA dalam Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Teknis dan Vegetasi

Kelompok komunitas GNKPA juga mempunyai peran utama dalam mewujudkan tingkat keterpaduan yang paling ideal dalam pelaksanaan pembangunan yang meliputi :

- (1) Keterpaduan dalam (satu) lokasi penangananan,
- (2) Keterpaduan dalam bersinergi waktu yang tepat,
- (3) Keterpaduan dalam bersinergi sesuai fungsi dan tupoksi.

Ilustrasi bentuk-bentuk keterpaduan kegiatan dalam aksi tindak nyata GNKPA untuk masing-masing pekerjaan sipil teknis dan vegetasi yang diberikan oleh masing-masing sektor. Ketiga bentuk keterpaduan yang terjadi di desa Mentasan kecamatan Kawunganten kabupaten Cilacap dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Keterpaduan dalam bentuk penanganan bersama dalam satu lokasi GN-KPA, oleh Ditjen SDA Dep PU / BBWS Citanduy, Ditjen RLPS / Dinas Kehutanan dan Ditjen PLA / Dinas Pertanian Kab. Cilacap, yaitu di desa Mentasan, kecamatan Kawunganten, kabupaten Cilacap, Sub DAS Citanduy, anak sungai kali Brokeh. Keterpaduan dalam bentuk bersinergi untuk berbagi waktu yang tepat dimana pembangunan embung

oleh Ditjen SDA/BBWS Citanduy (Kapasitas pelayanan 3 Desa / 400 KK) diikuti dengan penanaman penghijauan pada daerah hulunya serta pemanfaatan daerah di sekitar dan di bawah embung dengan Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT)

- b. Keterpaduan dalam bersinergi sesuai fungsi dan tupoksi masing-masing. Embung yang dibangun Ditjen SDA Dep. PU akan terjaga dari banyaknya sedimentasi karena daerah hulunya sudah ditanami hutan konservasi (kayu albasia / jenis tanaman kayu) sementara penyediaan lahan di sekitar dan di bawah embung untuk tanaman hortikultura, palawija, ternak, dan ikan dari Ditjen PLA / Dinas Pertanian telah mendapat supply air baku untuk pengairan tanaman dari pembangunan embung tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Terdapat tiga penggerak utama (*prime mover*) integrasi potensi pemangku kepentingan dalam konservasi SDA, yaitu ; Peran dalam Pembentukan Kelompok Komunitas, Peran Kelompok Komunitas Konservasi SDA, dan Peran Program Berbasis Komunitas.
2. Peran Pemangku Kepentingan dapat melakukan fungsi fasilitasi untuk pembentukan kelompok komunitas GNKPA yang terpadu melalui proses pemetaan sosial dan pelatihan pendamping komunitas

3. Peran strategis yang dilakukan oleh kelompok komunitas GNKPA tingkat desa adalah tersusunnya program terpadu GNKPA berbasis komunitas, terwujudnya keterpaduan kegiatan penyelamatan dan konservasi SDA pada pelaksanaan di tingkat lokasi, serta peran dalam penyelesaian permasalahan sosial dan permasalahan atas kurangnya keterpaduan di lapangan.

4. Kelompok komunitas GNKPA tingkat desa hakikatnya merupakan representasi tugas dan fungsi sektor-sektor bidang konservasi dan konservasi SDA. Hal ini mengingat yang tergabung dalam kelompok komunitas GNKPA tingkat desa adalah kader-kader pembangunan atau kelompok-kelompok binaan masing-masing sektor tersebut.

5. Pada saat koordinasi dan keterpaduan antarsektor menjadi sesuatu yang mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan, kelompok komunitas GNKPA tingkat desa yang dibentuk melalui proses penelitian dan kajian lapangan muncul sebagai penggerak utama dengan program terpadu GNKPA berbasis komunitas yang dibuatnya menjadi acuan keterpaduan masing-masing sektor

B. Saran

1. Sebagai strategi peningkatan peran masyarakat seperti amanat UU SDA nomor 7 tahun 2004 pasal 70 ayat 2 – 4, maka guna terwujudnya efektivitas keterpaduan konservasi SDA sebagai bagian dari aksi tindak nyata implementasi GNKPA di tingkat desa

lokasi DAS kritis, upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan peran kelompok komunitas GNKPA tingkat desa barulah suatu langkah yang tepat.

2. Perlunya langkah fasilitasi yang serius guna terwujudnya realisasi kegiatan nomor 1 tersebut di atas, terutama oleh para *stakeholder* utama, seperti Dit. Jen.SDA Dep.PU / BBWS & BWS, Dit.Jen.PLA Dep. Pertanian / Dis. Pertanian dan Dit.Jen.RLPS Dep. Kehutanan / Dis. Kehutanan.

3. Penyediaan dana dalam DIPA harus diprioritaskan untuk fasilitasi tersebut. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan semacam Sosialisasi dan Pendampingan masyarakat, harus difokuskan untuk membiayai tiga hal penting, yaitu: Kelompok komunitas GNKPA tingkat desa yang diawali dengan Kajian Lapangan Pemetaan Sosial, Pelatihan pendamping komunitas, dan pembiayaan untuk tenaga pendamping pascapelatihan guna terselenggaranya pendampingan kelompok GNKPA yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran an Pendekatan Praktis)*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Creswell, John W., 1994, *Research Design, Qualitative and Qualitative Approaches*, California, SAGE Publication Inc.

- Dharmawan, Arya Hadi, dkk., 2004. *Desentralisasi Konservasi dan Sistem Tata Pemerintahan Sumberdaya Alam Daerah Aliran Sungai Citanduy*. Bogor : Pusat Studi Pembangunan, Institut Pertanian Bogor.
- Du Bois, William D., *Applying Sociology: Making a Better World*, Allyn and Bacon, 2001
- Hadi, Sudharto P., 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 284/Kpts/11/99, tanggal 7 Mei 1999.
- Koentjaraningrat, 1985, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Gramedia
- Koentjaraningrat, 1989, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia
- Miles, Mathew B. & Huberman, A. Michael, 1984, *Qualitative Data Analysis*, California : SAGE Publication, Inc.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 377 tahun 2005 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA)*
- Rudito, Bambang dan Arif Budimanta, 2003. *Metode dan Teknik Konservasi Community Development*. Jakarta : ICSO.
- Sekretariat Tim GN-KPA AntarDep, 2006. *Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi GN-KPA*, Jakarta.
- Sekretariat Tim GN-KPA AntarDep, 2005. *Pedoman Rencana Kerja Pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA)*, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2003. *Metode dan Teknik Pemetaan Sosial*, www.policy.hu.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama,.
- Undang-undang SDA No. 7 tahun 2004: Bab III tentang Konservasi Sumber Daya Air, Pasal 21 ayat 4, Bab IX tentang Pemberdayaan dan Pengawasan, pasal 70 ayat 2 -4.
- Wysocki, Diane Kholos, 2001. *Reading in Social Research Methods*. Canada : Wadsworth Thomson Learning.